



Pengembangan Hukum Teoretis

Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H.
Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.H.
Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

Dr. Anthon F. Susanto
FH UNPAS Bandung
Komisi Yudisial

PENGEMBANGAN HUKUM TEORETIS

Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H.

Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.H.

Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

Dr. Anthon F. Susanto
FH UNPAS Bandung
Komisi Yudisial



LoGoz
Publishing

PENGEMBANAN
HUKUM TEORETIS
*Refleksi atas Konstelasi
Disiplin Hukum*
© 2014

Cetakan Pertama,
November 2014

Diterbitkan oleh:
Logoz Publishing
Soreang Indah V-20
Bandung 40911
Telp/Fax 022-85874472
logozpublishing@gmail.com

Penulis:
Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H.
Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.H.
Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

Editor:
Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.H.

Penata Letak
Aep Gunarsa

Perancang Sampul
Hendra Kurniawan

© 2014.
Hak Cipta dilindungi
oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun
tanpa izin penulis dan penerbit.

Katalog Dalam Terbitan

PENGEMBANAN
HUKUM TEORETIS
*Refleksi atas Konstelasi
Disiplin Hukum*,
Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H.;
Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.H.;
Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
Editor: Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.H.
-Ed.1. -Cet.1.
- Bandung: Logoz Publishing, 2014
1 jil., x + 154 hlm.; illus.; 13 x 20 cm

ISBN 978-602-9272-29-1

Pengantar Editor

Tepat tanggal 8 Oktober 2014, seorang guru kami, **Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H.**, berulang tahun ke-76. Sudah menjadi obsesi kami berdua sejak lama, sebagai murid-murid beliau, untuk suatu saat menghadirkan kado kecil ulang tahun berupa publikasi buku yang mengangkat topik yang beliau minati. Tampaknya, kado ulang tahun ke-76 ini akhirnya bisa menjadi kenyataan. Kado ini menjadi istimewa karena satu tulisan beliau yang pernah dimuat di *Jurnal Pro Justitia*, Tahun XX, No. 3, Juli 2002, ikut dimuat sebagai pembuka wacana buku ini.

Kata kunci yang tertera di judul buku ini, '*Pengembangan Hukum*' adalah istilah yang orisinal berasal dari **Prof. Bernard Arief Sidharta**. Kata ini merupakan terjemahan dari '*rechtsbeoefening*'. Pengembangan (dari kata dasar 'emban') hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kegiatan itu mencakup aktivitas membentuk,

Senarai Isi

Pengantar Editor v

DISIPLIN HUKUM: Tentang Hubungan
antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan
Filsafat Hukum (*State of The Arts*)

Bernard Arief Sidharta 1

Dialog tentang Keilmiahan Ilmu Hukum

Anthon F. Susanto 33

Teori Hukum Berstatus Canda

Sidharta 107

Biografi Singkat Para Penulis 153

- H.Ph. Visser 't Hooft, FILOSOFIE VAN DE RECHTS-
WETENSCHAP, Tjeenk Willink, Leiden, 1988.
- Helmut Coing, THE ORIGINAL UNITY OF EUROPEAN
LEGAL SCIENCE, Law and State, Vol. II, 1977.
- J.J.H. Bruggink, REFLEKSI TENTANG HUKUM, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- J.M.M. Maeijer (ed.), RECHTSSOCIOLOGIE EN JURI-
METRIE, Kluwer, Deventer, 1970.
- Jan Romein, AERA EROPA. Peradaban Eropa sebagai
penjimpangan dari pola umum, Ganaco N.V.,
Bandung-Djakarta-Amsterdam, 1956.
- Johnny Ibrahim, TEORI & METODOLOGI PENELITIAN
HUKUM NORMATIF, Bayumedia Publishing,
Malang, 2005.
- Mark van Hoecke, AARD EN METHODE VAN DE
RECHTSDOGMATIEK, R & R no.3, 1984.
- Nonet-Selznick, LAW AND SOCIETY IN TRANSITION.
Toward a responsive law, oleh Phillippe Nonet dan
Philip Selznick, Harper & Row, New York, 1978.
- Paul Scholten, STRUKTUR ILMU HUKUM (De structuur
der rechtswetenschap, 1945.), Penerbit Alumni,
Bandung, 2003.
- Satjipto Rahardjo, HUKUM DALAM JAGAT KETERTIBAN,
UKI Press, Jakarta, 2006.

Dialog tentang Keilmiahan Ilmu Hukum¹

Antho F. Susanto

*"Andai teori yang berbeda ditemukan kelak pada masa depan,
Saya pikir perjalanan menembus waktu tetap mustahil.
Jika tidak mustahil, maka kiranya kita sekarang sudah
didatangi pelancong dari masa depan..."*

(Stephen Hawking, *My Brief History*, 2014)

Apakah Hukum Sebuah Ilmu?

Hukum dikatakan memiliki banyak wajah, atau berfasa-
set banyak, sehingga dapat dilihat dari berbagai sudut pan-
dang atau pendekatan. Pendekatan mana yang paling
sesuai untuk memahami hukum, adalah pertanyaan lain
yang seringkali menyesatkan daripada memberikan

¹ Tulisan ini dibuat didasarkan kepada sumber-sumber utama bahan
perkuliahan di Program S3 Ilmu Hukum Universitas Parahyangan
Bandung, untuk mata kuliah Sistem Filsafat Hukum Indonesia. Bahan
tersebut dikompilasi oleh Prof. Dr. Arief Sidharta. Bahan-bahan itu
ada dalam bentuk terjemahan ataupun karya beliau yang belum
dipublikasikan. Penulisan ini diharapkan mampu menyediakan
sumber yang lebih formal dan bisa dikutip oleh mahasiswa untuk
kepentingan penulisan ataupun penelitian dan pengkajian.

penjelasan mencerahkan. Sejak zaman modern (perkembangan ilmu saat ini), kekuatan metode ilmiah menjadi tulang punggung sehingga ilmu mendapat penghargaan dan perlakuan yang istimewa. Melalui metode ilmiah, ilmu dianggap berjasa, dan mampu mengangkat ilmuwan pencetusnya menjadi tokoh terkemuka bahkan memperoleh banyak penghargaan.

Penghargaan yang tinggi terhadap Ilmu ditemukan dalam berbagai hal, bahkan banyak ilmuwan mendapatkan keuntungan dari berbagai pemberitaan media. Banyak di antara mereka yang menjadi birokrat, pejabat negara sampai menjadi legislator, meskipun (sebagian di antaranya) telah menggunakan tipuan dan trik murahan untuk kepentingan pribadi mereka. Beberapa topik berbagai surat kabar telah memperlihatkan, bahwa mengaku seorang ilmuwan akan banyak mendapat penghargaan lebih dari masyarakat, bahkan dalam hal kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh ilmuwan dianggap sebagai bagian dari kebenaran? Atau paling tidak sebagai bagian dari proses pencarian kebenaran. Bagaimana dengan ilmu hukum? apakah dapat dikatakan bahwa ilmu hukum bertujuan mencari (sedikitnya mendekati) kebenaran?

“Apakah hukum sebagai ilmu? Adalah pertanyaan yang sering diajukan ketika membahas tentang keilmiahannya hukum? Biasanya ditempatkan sebagai pertanyaan pembuka bagi mereka yang ingin belajar ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum dan filsafat ilmu hukum.

Bekalipun jawaban terhadap hal itu tidak cukup memuaskan, namun para teoretisi hukum senantiasa (tidak pernah surut) mencari alternatif-alternatif terbaik dan komprehensif untuk menjelaskannya. Kemungkinan debat tentang hal ini akan dianggap sebagai pembicaraan omong kosong tingkat tinggi, atau sebagai dialog konyol yang menghambur-hamburkan waktu, namun harus diakui bahwa diskusi mengenai hal ini tetap menjadi topik hangat (dalam berbagai kesempatan) dan juga merupakan tema sentral dalam dialog (fundamental) tentang hukum, di lingkungan akademisi/teoretisi.

Satu jawaban terhadap persoalan ini, tidak dapat menyelesaikan masalah, namun harus diakui bahwa pembahasan, selalu menjadi pekerjaan rumah atau merupakan agenda rutin di lingkungan kaum terpelajar. Kita menemukan pada satu sisi jawaban ilmuwan hukum sangat dogmatik; seolah ilmu hukum hanya berkait dengan sistem aturan yang tersistematis, dengan metode khusus dan eksklusif. Pada wilayah lain, ilmuwan hukum mengkategorikan ilmu hukum disebut sebagai “ilmu tentang penilaiain”, atau “ilmu tentang penafsiran” yang terkait dengan konsep “hermeneutik”. Terdapat pula pandangan yang melihat bahwa ilmu hukum sebagai sebuah bangunan dari Ilmu Sosial, sehingga yang cocok digunakan adalah pendekatan ilmu-ilmu sosial, bahkan salah satu argumen dari tulisan yang disajikan memotret pendekatan ilmu-ilmu alam dapat digunakan terhadap ilmu hukum.

Apakah perdebatan tentang keilmiahannya ilmu hukum memiliki manfaat bagi “ilmu” itu sendiri? Secara pasti dapat dijawab “Ya”, yaitu meningkatkan kualitas keilmuan “hukum itu”, namun apakah perdebatan itu memiliki manfaat bagi masyarakat? Sekalipun belum dapat dipastikan, tetapi secara tidak langsung ada hubungan yang erat di antara keduanya. Sebagaimana dikatakan para pakar bahwa pandangan umum dalam ilmu (paradigm) menentukan terhadap cara berpikir dan bertindak para ilmuwan dan praktisi bahkan masyarakat (secara umum) yang kemudian hal itu dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengkajian terhadap hakekat keilmiahannya ilmu hukum akan terkait dengan persepsi ilmuwan, praktisi dan masyarakat dan menentukan penegakan hukum (pengambilan keputusan).

Kita menemukan bahwa berapa orang merasa terganggu dengan “pertanyaan itu”, khususnya apabila ditanyakan seberapa besar manfaat perdebatan bagi masyarakat? Sebagai contoh, seberapa besar kemungkinan hakim memberikan keadilan tanpa terusik aspek keilmiahannya hukum? Apakah fakultas hukum sebagaimana teman saya (dengan bergurau) mengatakan “sudah siap menggunakan kata “ilmu” di depan “menjadi fakultas Ilmu Hukum”? Hal itu hanya bisa dijawab, ketika fakultas Hukum tidak lagi hanya menyiapkan para sarjana hukum menjadi tukang atau robot-robot undang-undang, atau

hal itu akan terjadi ketika fakultas hukum telah memberikan ruang yang memadai bagi sebuah perdebatan lintas kajian, dan memberikan bobot yang lebih banyak pada kegiatan penelitian atau apakah kita masih alergi apabila dikatakan bahwa “kita semua menjadi tukang sulap dan tukang nujum”?

Kaum cendekia selalu mengatakan, bahwa “*segala sesuatu itu harus disertai dengan ilmunya*”, atau seperti sebuah ungkapan bijak “*sesuatu yang dilakukan di dasarkan kepada ilmu akan menjadi lebih bermakna dan mampu meningkatkan kualitas kebermanfaatannya*”. Ungkapan itu terlihat lebih jujur dalam membicarakan kemanfaatan ilmu bagi kita, paling tidak bahwa mempersoalkan keilmiahannya ilmu hukum memberikan kita ruang gerak yang leluasa, yaitu mengeksplorasi wilayah wilayah yang belum tersentuh, memberikan penjelasan yang terbarukan dan tentu menggerakkan kita untuk lebih arif dalam bertindak”. Oleh karena itu ketika ditanya, apa manfaat praktisnya perdebatan itu? Sepintas lalu dapat disebutkan, letak kemanfaatannya untuk menggosok nalar dan mengasah jiwa.

Persoalan keilmiahannya ilmu hukum, sekalipun selalu menjadi topik hangat di lingkungan teoretisi hukum, namun awalnya merupakan topik yang membosankan untuk dibahas, paling tidak karena banyak penjelasan tidak memunculkan alternatif baru tetapi hanya berkutat pada pilihan-pilihan yang itu itu juga, sehingga orang-orang

hukum (yaitu mereka praktisi teknis/pengembangan hukum praktis) akan melihat bahwa mempersoalkan keilmiahan hukum bukan wilayah yang patut mereka perhatikan. Hal lainnya adalah perdebatan begitu sulit untuk dipahami bagi mereka, mengingat istilah/terminologi dan juga hasil akhirnya tidak seperti yang mereka harapkan yaitu serba abstrak dan selalu mengandung ketidakpastian. Namun hal itu saat ini telah berubah, begitu banyak praktisi hukum meluangkan waktu untuk mengkaji aspek ini, bahwa di lingkungan pendidikan S2 dan S3 Ilmu Hukum, praktisi hukum begitu mendominasi. Sekalipun dengan beragam pemahaman, namun hakekatnya bahwa persoalan ini tidak lagi dapat diklaim sebagai melulu persoalan teoretik dan hanya domain akademisi (ilmuwan) saja, tetapi juga memiliki implikasi-implikasi serius di dalam kegiatan praktek hukum.

Tulisan ini berharap, bahwa beberapa substansi utamanya akan lebih mudah dicerna, mengingat rujukan yang digunakan adalah sumber-sumber yang mudah dilacak, dan juga telah diterjemahkan oleh mereka yang memiliki kompetensi tidak diragukan lagi. Sehingga, meskipun materinya sangat filosofis (teoretik/abstrak), namun dapat dicerna dan diserap oleh mereka yang menempuh studi S2 atau S3 Ilmu Hukum. Melalui pertimbangan itu pula, dan untuk memudahkan pembacaan, maka tulisan tentang keilmiahan ilmu hukum ini dilakukan dengan cara mendialogkan sumber-sumber acuan utama dengan harapan

poin-poin perdebatan terbaca lebih mengalir dan terangkai (saling bertautan). Tulisan ini diharapkan pula mampu memberikan sudut pandang minor, tentang aspek keilmiahan ilmu hukum dari begitu banyaknya karya pakar ternama. Argumen-argumen dalam tulisan ini diupayakan terlihat runtut, saling berkaitan serta lebih lengkap, meskipun tidak menghilangkan pandangan kontra dan argumen saling mengecualikan dari para pakar. Percaya atau tidak, perdebatan mengenai keilmiahan Ilmu Hukum membawa kita masuk jauh kepada diskusi filosofis, tentang kekeliruan pemahaman yang menimbulkan dampak dampak serius bagi perkembangan ilmu dan penegakan hukum dalam masyarakat.

Tulisan ini menyoal tentang hakekat keilmiahan dari ilmu hukum, yang sesungguhnya merupakan kompilasi dari beberapa tulisan/sumber **Prof. B. Arief Sidharta**, baik berupa tulisan yang ditulis sendiri maupun hasil terjemahan karya penting dari berberapa pakar hukum terkemuka, khususnya karya **Carel Stolker**, **Carel Smith**, dan **Arend Soeteman**. Substansi utamanya tidak diintervensi oleh penulis, namun disajikan sesuai argumentasi para tokoh itu, kecuali bagian pendahuluan dan penutup. Oleh karena itu tulisan ini lebih mengekspresikan tulisan kompilasi tersebut, meskipun karena keterbatasan penulis, mengakibatkan tulisan ini menjadi "*travestis*"² -- yaitu tidak menja-

² *Travestis* = kelamin ganda - atau banci

dikan pembahasan lebih spesifik, tetapi menjadikan lebih luas dan terbuka.

Tulisan ini menggunakan sumber sumber utama sebagai berikut:

- a. Tulisan karya **Carel Stolker**, berjudul "*Perihal status keilmuan dari ilmu hukum*", diterjemahkan oleh **Tristam Moeliono**³. Tulisan ini (sepanjang pengetahuan penulis) meskipun belum diterbitkan secara terbuka/luas (tetapi baru untuk kalangan sendiri di FH Unpar) dipilih karena memuat penggambaran aspek keilmiahan ilmu hukum cukup mendalam dan komprehensif, di samping itu substansinya menjadi pemicu perdebatan beberapa pakar hukum di Belanda, yang (menurut hemat penulis) akan menarik dibahas untuk kalangan teoretisi hukum Indonesia;
- b. Tulisan kedua yang dijadikan rujukan adalah buku karya **Carel Smith**, berjudul "*Het normatieve karakter van de rechtswetenschap: recht als oordeel*" diterjemahkan oleh **B. Arief Sidharta** menjadi "*Karakter Normatif Ilmu Hukum*": hukum sebagai penilaian.

3 Bahan ini saya peroleh dari Prof Arief Sidharta sebagai bahan kuliah atau diskusi di Program S3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNPAR Bandung, yaitu bahan Sistem Filsafat Hukum. Pengutipan terhadap sumber itu dilakukan penulis. Penulis memperoleh bahan itu dalam bentuk *soft copy* dan nampaknya (sepanjang pengetahuan penulis) belum dipublikasikan, tetapi sudah dijadikan bahan utama di lingkungan Program Doktor Ilmu Hukum. Tulisan itu adalah karya Carel Stolker yang kemudian diterjemahkan oleh sdr. Dr. Tristam Moelyono;

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 2010 (masih diperuntukan untuk lingkungan terbatas). Substansi tulisan itu berkaitan secara langsung dengan tulisan **Carel Stolker**, yaitu sebagai kritik terhadap argumen ilmiah **Stolker**.

- c. Tulisan ketiga adalah karya **Arend Soeteman**, berjudul "*Ilmu Hukum yang Ilmiah; Komentar terhadap Prasaran Carel Smith tentang Karakter Normatif Ilmu Hukum*", diterjemahkan oleh **B. Arief Sidharta**, dan diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, 2010 (lingkungan terbatas). Tulisan ini merupakan komentar langsung terhadap pemikiran **Carel Smith** (sebagaimana terlihat di dalam judulnya). Sekalipun **Arend Soeteman** menyetujui beberapa argumen **Carel Stolker**, namun demikian terdapat beberapa kritik terhadapnya.
- d. Tulisan lainnya adalah beberapa eksemplar **B. Arief Sidharta**, berupa materi perkuliahan yang belum/ sudah dipublikasikan, baik karya terjemahan ataupun berupa tulisan beliau sendiri.

Untuk menghindari distorsi terhadap pembaca, argumen dari beberapa pakar di atas, disajikan dengan utuh (lengkap), sehingga tulisan ini lebih merupakan sajian ulang (hampir seluruhnya kutipan tulisan pakar) dengan pencantuman pendapat yang lebih utuh, bahkan

Pengembangan Hukum Teoretis

Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum

Pengembangan hukum (dari kata dasar '*emban*') adalah sebuah terminologi yang diperkenalkan oleh Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H. sebagai pengganti kata '*rechtsbeoefening*'.

Pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum, yang mencakup baik pengembangan hukum teoretis maupun praktis. Buku ini menelaah pengembangan hukum teoretis (*theoretische rechtsbeoefening*), yaitu kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual tentang hukum atau pemahaman hukum secara ilmiah. Tataran analisisnya mencakup tiga tingkat abstraksi, yaitu: (1) ilmu-ilmu hukum, baik ilmu hukum normatif maupun empiris; (2) teori hukum; dan (3) filsafat hukum.

Pembaca akan disodorkan panorama yang mencerahkan atas ketiga tataran pengembangan hukum teoretis ini yang sangat bermanfaat dalam memahami seluk beluk disiplin hukum secara lebih hakiki.



ISBN 978-602-9272-29-1



9 786029 272291